

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi Islam diartikan sebagai proses pengentasan kemiskinan dan menciptakan kedamaian, kenyamanan dan ketertiban dalam hidup. Dalam pengertian ini, pembangunan ekonomi perspektif Islam mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif multidimensi. Tujuannya bukan hanya kesejahteraan materi di dunia, tetapi juga kesejahteraan masa depan. Menurut Islam, keduanya adalah satu. (Almizan, 2016)

Salah satu yang diperhatikan dalam pembangunan adalah Infrastruktur. Infrastruktur sangatlah berperan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dapat diketahui bahwa pada wilayah dengan infrastruktur yang mencukupi lah kita dapat menjumpai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. (Pratiwi, 2017)

Selain itu, Penyediaan infrastruktur yang efektif, efisien serta berkelanjutan merupakan faktor yang dapat mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.(Chen & Bartle, 2017). Untuk mendorong pembangunan infrastruktur secara cepat dan merata di seluruh wilayah membutuhkan anggaran dan biaya yang besar, apalagi Indonesia memiliki luas wilayah yang besar dan jumlah penduduk yang padat, infrastruktur yang baik sangatlah diperlukan, belum lagi adanya kesenjangan atau perbedaan yang signifikan antara infrastruktur di kawasan Jawa dan Luar Jawa.

Permbangunan Infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah tidak sepenuhnya didapat dari Pendapatan negara seperti pajak, maka dibutuhkan pembiayaan atau cara lain agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan, maka pemerintah menempuh cara dengan melakukan pinjaman luar negeri hingga menimbulkan masalah defisit Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Semakin beragamnya masalah dan program pembangunan di Indonesia membawa konsekuensi beban anggaran yang semakin besar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di sisi lain pemerintah menghadapi keterbatasan dalam penerimaan Negara, sehingga menimbulkan utang. Utang yang mayoritas berasal dari luar negeri semakin bertambah yang berarti juga semakin memberatkan posisi APBN RI, karena utang luar negeri tersebut harus dibayarkan berikut dengan bunganya dalam mata uang dolar umumnya. (Khatimah, 2017)

Pembiayaan untuk Pembangunan Infrastruktur harus dilakukan, maka negara dalam hal ini mengeluarkan surat berharga Negara. Adapun surat berharga yang dilakukan pemerintah diantaranya untuk melakukan pembiayaan konvensional dan pembiayaan syariah dalam membangun infrastruktur.

Sekarang ini model pembiayaan syariah sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat dan juga mempunyai daya tarik tersendiri bagi investor. Khususnya di Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Maka dengan model pembiayaan syariah memiliki potensi akan diminati pasar modal. Model pembiayaan syariah sendiri mempunyai prinsip-prinsip yang dipegang secara konsisten yaitu terhindar dari gharar (spekulasi), maisyir (ketidakpastian), dan riba (bunga). Hal tersebut yang menjadi salah satu alasan mengapa model pembiayaan syariah tersebut diminati oleh investor yang beragama islam. (Dewi, 2019)

Salah satu model pembiayaan syariah yang ada di Indonesia adalah sukuk. Sukuk merupakan bentuk pembiayaan syariah yang tergolong baru karena perkembangannya sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. (Datuk, 2014)

Menurut Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sukuk adalah surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Pihak yang menerbitkan sukuk negara

adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menerbitkan sukuk. Asetnya adalah barang milik negara yang memiliki nilai ekonomis yang dijadikan sebagai dasar penerbitan sukuk negara. (Pratiwi, 2017)

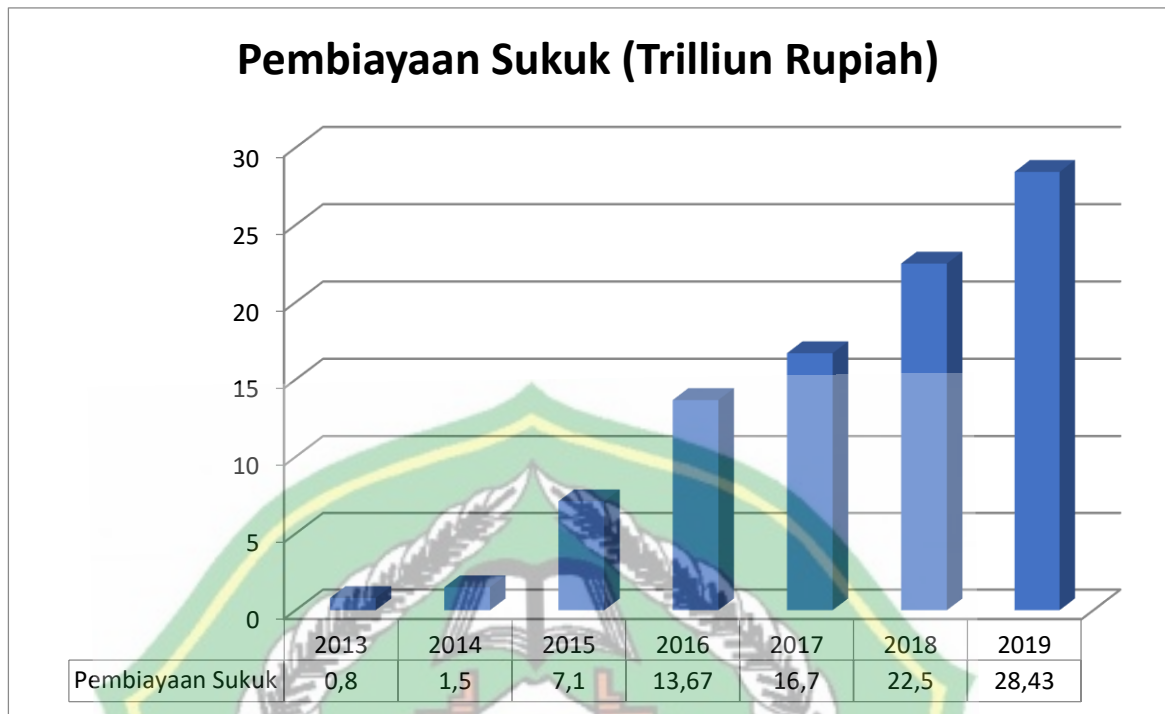
Tabel 1.1 Penerbitan Sukuk Negara (SBSN)

HASIL PENERBITAN SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA TAHUN 2019				
Jenis Instrumen	Metode Penerbitan	Frekuensi	Nominal Penerbitan (juta Rupiah)	Porsi (%)
PBS	Lelang	23	141.455.000	54.7
SPN-S	Lelang	23	37.360.000	14.47
PBS	<i>Private Placement</i>	10	19.641.594	7.60
USDPBS	<i>Private Placement</i>	1	28.110.000	0.54
SNI	Bookbuilding	1	28.110.000	10.88
ST	Bookbuilding	4	8.436.570	3.37
SR	Bookbuilding	1	21.864.647	8.47
TOTAL		63	258.275.411	100.00

Sumber: Laporan Tahunan DJPPR Kementerian Keuangan Tahun 2019

Dalam Tabel tersebut dijelaskan bahwa sukuk Negara diterbitkan dengan berbagai jenis dan masing masing jenis diterbitkan dengan metode penerbitan yang berbeda beda dan frekuensi yang berbeda juga, dari jumlah tersebut diketahui bahwa PBS lelang merupakan Sukuk Negara yang memiliki porsi terbesar dibandingkan dengan jenis sukuk yang lain. Akan tetapi tidak semua seri diterbitkan setiap tahun secara konsisten, hanya ada tiga seri yang diterbitkan secara konsisten dari tahun 2012 hingga 2019 yaitu Seri Project Based Sukuk , Sukuk Ritel dan Sukuk Negara Indonesia.

Grafik 1.1 Pembiayaan dari sukuk dalam Trilliun Rupiah

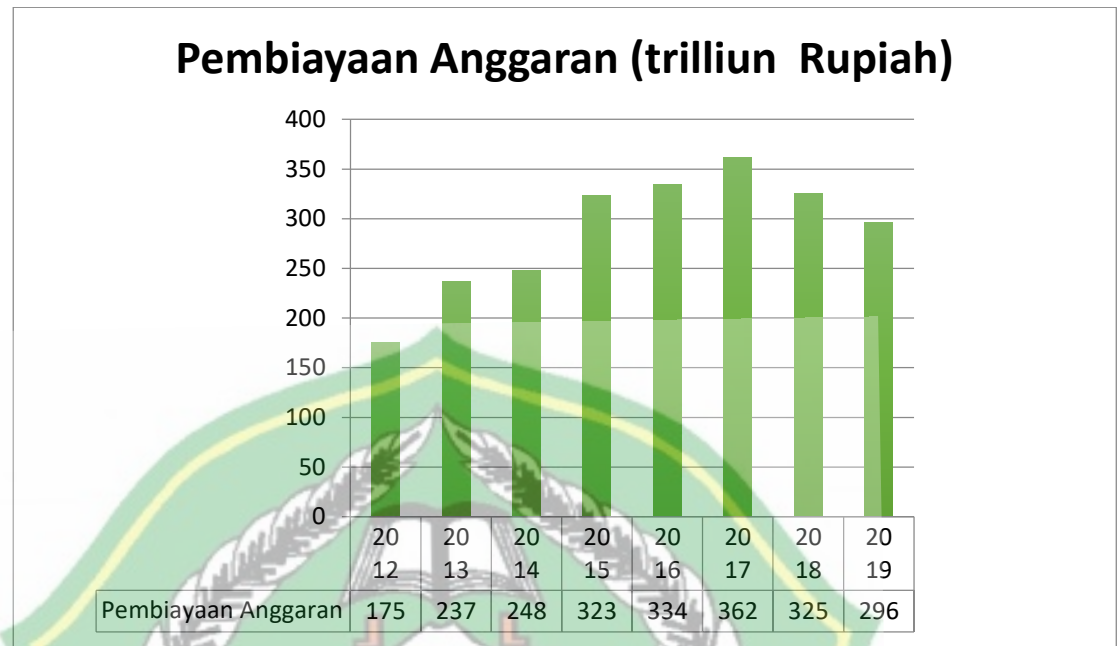


Sumber : DJPPR Kemenkeu

Dapat dilihat angka proyek yang pembiayaan dari sukuk Negara selalu mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun 2013-2019 jika di tahun 2013 belum mencapai 1 triliun , pada 2019 sudah mencapai 28 triliun lebih, artinya sukuk cukup memiliki peran yang besar dalam membiayai pembangunan.

Nilai pembiayaan anggaran untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara mengalami keadaan yang meningkat dari tahun 2012 hingga 2017 walaupun pada 2018 dan 2019 nilainya mengalami penurunan, itu artinya Negara membutuhkan anggaran yang besar untuk membiayai APBN yang mengalami defisit. Berikut ini grafik pembiayaan anggaran dari tahun 2012-2019:

Grafik 1.2 Pembiayaan Anggaran dalam APBN



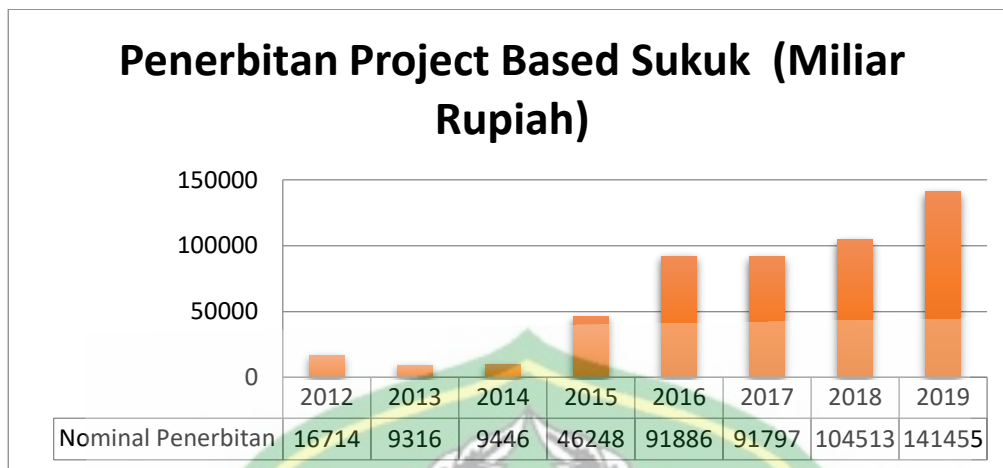
(Sumber: Kemenkeu, diolah)

Pembiayaan Anggaran Negara digunakan untuk berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan hingga infrastruktur artinya sumber pendapatan juga harus memadai untuk membiayainya, hal ini membuat Negara harus mendapat pembiayaan untuk anggaran pendapatan belanja Negara.

Untuk membiayai anggaran tersebut pemerintah melakukan pembiayaan dengan melakukan pembiayaan dengan prinsip konvensional dan syariah, prinsip konvensional dengan cara penerbitan Surat utang Negara dan prinsip syariah dengan Sukuk Negara.

Sukuk Negara atau SBSN yang menggunakan prinsip syariah yang diterbitkan dengan berbagai seri, yaitu Islamic Fixed Rate, Sukuk Dana Haji Indonesia, Surat Perbendaharaan Negara Syariah, Sukuk Tabungan, Sukuk Ritel, Sukuk Negara Indonesia dan Project Based Sukuk. Akan tetapi hanya tiga seri terakhir yang diterbitkan setiap tahun dari tahun 2012-2019.

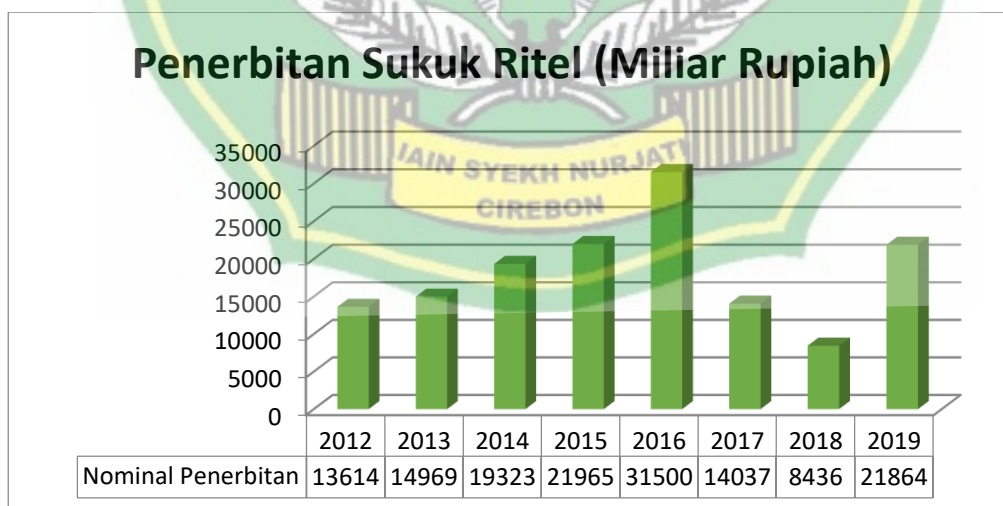
Grafik 1.3 Perkembangan Project Based Sukuk (PBS)



Sumber: (DJPPR Kemenkeu, diolah)

Berdasarkan Grafik diatas, perkembangan PBS (Project Based Sukuk) mengalami perkembangan pesat, tahun 2012 dan 2014 hanya menerbitkan 9 triliun kemudian tahun 2015 mencapai angka 46 triliun hingga pada tahun 2019 sudah mencapai 141 triliun. Walaupun pada tahun 2018 mengalami penurunan nominal penerbitan jika dibandingkan dengan tahun 2017.

Grafik 1.4 Perkembangan Sukuk Ritel (SR)

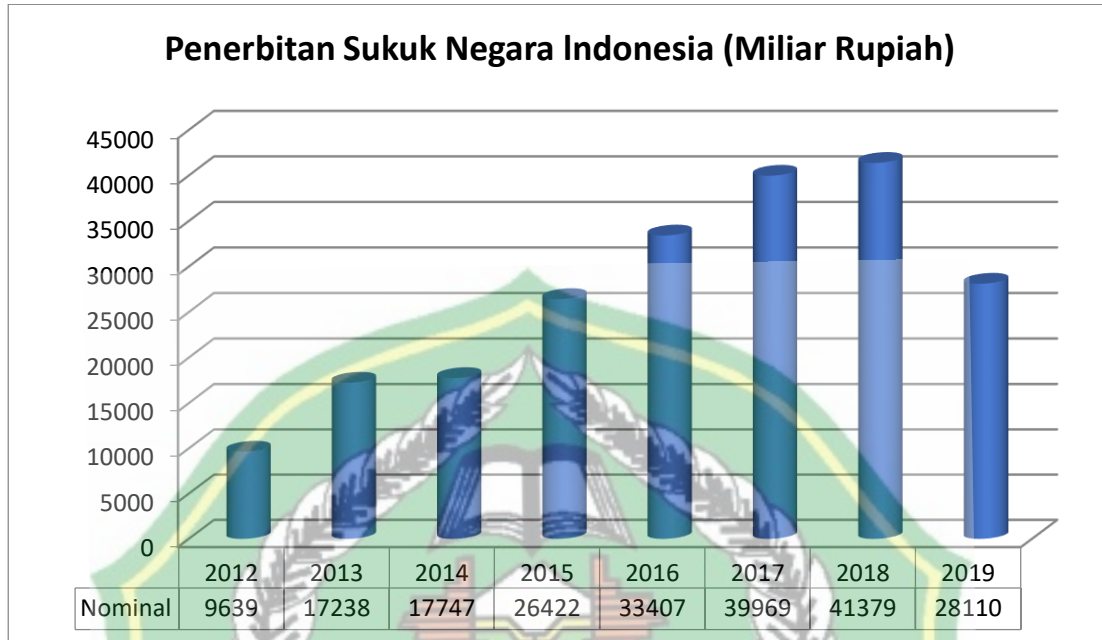


Sumber: (DJPPR Kemenkeu, diolah)

Perkembangan Sukuk Ritel (SR) Mengalami kenaikan penerbitan dari tahun 2012 hingga 2016 yaitu dari 14 triliun hingga 31 triliun , akan tetapi

pada tahun 2017 dan 2018 mengalami penurunan menjadi 14 triliun dan 8 triliun, dan pada 2019 nominal penerbitan kembali naik menjadi 21 triliun.

Grafik 1.5 Perkembangan Sukuk Negara Indonesia (SNI)



(Sumber: DJPPR Kemenkeu, diolah)

Sukuk Negara Indonesia (SNI) dari tahun 2012 hingga tahun 2018 selalu mengalami penerbitan SNI mengalami peningkatan dari 17 triliun hingga pada tahun 2018 sudah mencapai 41 triliun, akan tetapi pada tahun 2019 penerbitan SNI mengalami penurunan menjadi 28 triliun.

Pembangunan Negara yang membutuhkan anggaran yang besar menyebabkan pemerintah harus memiliki pendapatan yang besar juga, akan tetapi pendapatan Negara yang banyaknya didapatkan dari pajak belum mampu membiayai belanja Negara hingga mengalami defisit anggaran, kebijakan kebijaka telah dilakukan yaitu dengan melakukan kebijakan utang luar negeri akan tetapi berisiko jika makin besar nilainya mengingat harus dibayarkan beserta bunganya.

Maka dari itu pemerintah harus melakukan kebijakan lain, dalam hal ini pemerintah harus mendapatkan pendanaan yang lebih aman jika dibandingkan dengan utang. Maka dari itu pemerintah melakukan kebijakan

penerbitan Sukuk Negara dengan berbagai jenis, seri dan metode penerbitan yang berbeda beda.

Nilai penerbitan sukuk mengalami peningkatan dari awal diterbitkan, hingga tahun 2019 nilainya sudah mencapai 258.275.411 miliar rupiah. Seri sukuk yang selalu diterbitkan dalam jangka waktu dari tahun 2012-2019 hanya tiga seri yaitu Project Based Sukuk , Sukuk Ritel dan Sukuk Negara Indonesia. Ketiganya konsisten diterbitkan dan nilainya selalu besar.

Dari beberapa data dan fakta diatas, Project Based Sukuk, Sukuk Ritel dan Sukuk Negara Indonesia selalu diterbitkan. Ketiga seri sukuk Negara yang diterbitkan dengan cara berbeda dan nominal berbeda tersebut apakah memiliki dampak dan pengaruh yang baik terhadap pembiayaan pembangunan di Indonesia. Maka skripsi ini bertujuan untuk membahas tentang *Analisis Pengaruh Sukuk Negara Terhadap Pembiayaan Pembangunan di Indonesia.*

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan Latar belakang terdapat masalah yaitu:

1. Kurangnya anggaran untuk pembangunan infrastruktur, yang membuat pemerintah melakukan kebijakan utang luar negeri.
2. Defisit anggaran yang menyebabkan penambahan utang luar negeri.
3. Penerbitan seri sukuk project Based Sukuk, Sukuk ritel dan sukuk Negara Indonesia nilai penerbitannya mengalami perubahan dari tahun ke tahun .

C. Pembatasan dan Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti menjadi:

1. Data yang digunakan adalah sukuk negara Seri PBS (Project Based Sukuk), SR (Sukuk Ritel) dan SNI (Sukuk Negara Indonesia) dan APBN Pembiayaan Anggaran.

2. Data yang digunakan menggunakan data tahun 2012-2019.

Berdasarkan latar belakang masalah , maka dapat ditentukan perumusan masalah berikut ini:

1. Bagaimana pengaruh Project Based Sukuk (PBS) terhadap pembiayaan pembangunan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Sukuk Ritel (SR) terhadap pembiayaan pembangunan di Indonesia ?
3. Bagaimana pengaruh Sukuk Negara Indonesia (SNI) terhadap pembiayaan pembangunan di Indonesia ?
4. Bagaimana pengaruh Project Based Sukuk (PBS) , Sukuk Ritel (SR), dan Sukuk Negara Indonesia (SNI) terhadap pembiayaan pembangunan di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Project Based Sukuk (PBS) terhadap pembiayaan pembangunan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sukuk Ritel (SR) terhadap pembiayaan pembangunan di Indonesia.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Sukuk Negara Indonesia (SNI) terhadap pembiayaan pembangunan di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh Project Based Sukuk (PBS), Sukuk Ritel (SR), dan Sukuk Negara Indonesia (SNI) terhadap pembiayaan pembangunan di Indonesia.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Ilmiah

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan ilmiah dan menambah wawasan untuk mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk Masyarakat diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberikan masukan dan pengetahuan tentang Sukuk Negara atau SBSN sehingga masyarakat mulai berinvestasi Sukuk Negara atau SBSN.
- b. Untuk pemerintah diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu memberi masukan untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk pemanfaatan Sukuk agar lebih optimal dan menjadi media investasi masyarakat.

3. Manfaat Akademis

Sebagai perwujudan dari Tridharma Perguruan Tinggi IAIN Syekh Nurjati Cirebon khususnya Program Studi Perbankan Syariah Islam pada Fakultas Hukum Islam dan Ekonomi Islam merupakan sumbangan ide dan konsep bagi pengembangan ilmu dan materi untuk menghadapi penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan penelitian kepustakaan dan literatur, sebagai bahan pembelajaran dan informasi yang dapat memberikan referensi bagi masyarakat yang membutuhkan, khususnya bagi para mahasiswa yang ingin melakukan penelitian yang serupa dengan penulis baik itu dalam hal topik atau judul penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam paragraf dibawah ini.

Bab I Pendahuluan berisi tentang pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan secara garis besar permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah,identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

Bab II Landasan Teori, Di dalamnya berisi teori Sukuk, Surat Berharga Syariah Negara, Pembiayaan, Pembangunan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian, berisi tentang metodologi penelitian. Pada bab ini akan membahas mengenai ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan operasional variabel penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian, berisi tentang hasil dan pembahasan. Hasil yang diperoleh dari pengolahan data melalui metode yang digunakan akan dideskripsikan dan dianalisis dalam bab ini disertai dengan teori dan penelitian yang mendukung hasil dalam penelitian ini.

Bab V Penutup, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berisi rekomendasi dari peneliti kepada peneliti selanjutnya.

